



DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi SPBE Berdasarkan Perpres No.95 Tahun 2018: Studi Kasus Aplikasi Srikandi Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nurlina Darwis<sup>1</sup>, Muliani Sam<sup>2</sup>, Muhammad Rais Razak<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, [ainazhammil@gmail.com](mailto:ainazhammil@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, [mulisamiri77@gmail.com](mailto:mulisamiri77@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, [mraisahmat@yahoo.com](mailto:mraisahmat@yahoo.com)

Corresponding Author: [ainazhammil@gmail.com](mailto:ainazhammil@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The research aims to analyze the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) based on Presidential Regulation No. 95 of 2018, using a case study of the SRIKANDI application in Sidenreng Rappang Regency. The approach used is descriptive qualitative with a case study method, applying the policy implementation model of George C. Edward III, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research was conducted from November 2024 to January 2025. Data were collected through in-depth interviews with five key informants, participatory observation, and policy document analysis. The findings indicate that the SRIKANDI application has been adopted by 98.5% of Regional Apparatus Organizations (OPDs), significantly improving the efficiency of dynamic archive management. However, the implementation still faces challenges, particularly in bureaucratic structure due to the absence of Standard Operating Procedures (SOPs), limited human resources, and underdeveloped technological infrastructure. This study contributes to the development of an implementation model for e-government policy at the regional level and offers policy recommendations to accelerate digital transformation in archiving. The limitation of the study lies in its organizational-level focus. Further research is recommended to explore the broader impact of this policy on local governance.*

**Keyword:** *Public Policy, Digital Archiving, Implementation, Bureaucracy, Resources*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dengan studi kasus pada aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan selama November 2024 hingga Januari 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI

telah diadopsi oleh 98,5% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dinamis. Namun, implementasi masih menghadapi kendala, terutama dalam struktur birokrasi yang belum memiliki SOP, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model implementasi kebijakan *e-government* di daerah serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transformasi digital kearsipan. Keterbatasan penelitian terletak pada fokusnya di level organisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak kebijakan ini secara lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Kearsipan Digital, Implementasi, Birokrasi, Sumber Daya

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda prioritas di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan (Teku et al. 2024). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk meninggalkan praktik manual dan beralih ke sistem digital yang lebih terintegrasi (Wagola et al. 2023). Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka kebijakan nasional untuk mempercepat digitalisasi birokrasi (Razak 2023). Salah satu wujud implementasi kebijakan SPBE di bidang kearsipan adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang bertujuan untuk mengelola arsip secara digital, efisien, dan terdokumentasi dengan baik (Hernawan and Wijaya 2024). Penelitian ini mengangkat tema implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan fokus pada analisis proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaian antara kebijakan nasional dan realitas birokrasi di tingkat daerah.

Penelitian mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi SRIKANDI telah banyak dilakukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor publik masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan. Dasnoer et al.(2023) menemukan bahwa pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di Kecamatan Padang Utara mengalami kendala pada aspek infrastruktur dan rendahnya literasi digital, yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan arsip dinamis. Sementara itu, studi oleh Febriani & Putra (2023) di Kota Palembang menegaskan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan serta dukungan pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan sistem digital secara berkelanjutan. Penelitian oleh Piculima (2023) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan juga mengungkapkan bahwa aplikasi SRIKANDI belum optimal pada aspek pemusnahan arsip karena lemahnya pengawasan internal. Hafel (2023) mengemukakan bahwa temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pola tantangan yang konsisten di berbagai daerah, yang memperkuat urgensi analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SPBE dan aplikasi SRIKANDI di tingkat lokal, seperti yang menjadi fokus dalam studi di Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah wilayah yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya, khususnya dalam konteks sistem kearsipan digital. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap studi kebijakan digital di tingkat daerah yang selama ini masih didominasi oleh studi di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi, sehingga mampu mengungkap secara sistematis dinamika internal organisasi pemerintahan dalam mengadopsi sistem digital. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur mengenai pelaksanaan SPBE di daerah, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi kebijakan digital lainnya di wilayah berbeda.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi SRIKANDI dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan dokumentasi resmi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan kerangka teori implementasi George C. Edward III sebagai landasan analitis. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya pemetaan kendala dan potensi yang spesifik terhadap implementasi sistem kearsipan digital di tingkat daerah, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas SPBE, serta dapat dijadikan acuan kebijakan oleh pemerintah pusat dalam menyusun strategi pendampingan dan pengawasan implementasi digitalisasi birokrasi di wilayah lain.

Salah satu konsep kunci dalam implementasi kebijakan SPBE di bidang kearsipan adalah transisi dari sistem pengelolaan arsip manual menuju sistem digital yang terintegrasi (Khadija et al. 2024). Transisi ini tidak sekadar bergantung pada ketersediaan aplikasi seperti SRIKANDI, tetapi juga menuntut perubahan dalam pola kerja, kebiasaan administrasi, dan pemahaman terhadap nilai strategis data arsip (Suprayitno, Rahmi, and Sofiyani 2024). Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, meskipun aplikasi telah disediakan dan dioperasikan secara bertahap sejak 2022, masih terdapat dualisme praktik antara proses digital dan manual (Teku et al. 2024). Hal ini mencerminkan bahwa implementasi SPBE bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut kesiapan kelembagaan, perubahan perilaku birokrasi, dan penguatan tata kelola informasi publik (Wagola et al. 2023).

Konsep kedua yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pentingnya otoritas pengguna dalam sistem pemerintahan digital (Purnamaningsih 2024). Dalam sistem SRIKANDI, akun otoritatif, khususnya milik pejabat struktural, dirancang untuk menjalankan fungsi validasi dan otentikasi dokumen melalui tanda tangan elektronik (TTE) (Santoso and Purwaningsih 2024). Namun, di lapangan, masih ditemukan praktik pelimpahan akun kepada staf, sehingga proses digitalisasi kehilangan esensi transparansi dan akuntabilitasnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain sistem dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip digital governance. Oleh karena itu, pemahaman atas posisi strategis akun dan TTE menjadi penting sebagai bagian dari transformasi peran kepemimpinan birokrasi dalam ekosistem SPBE (Khadija et al. 2024).

Selain itu, integrasi sistem lintas perangkat daerah menjadi konsep penting dalam keberhasilan SPBE (Khadija et al. 2024). Aplikasi SRIKANDI dirancang untuk berjalan secara terstandar di semua OPD agar tercipta kesinambungan administrasi, interoperabilitas data, dan efisiensi dalam layanan internal (asmara siregar, ., and Septiawan 2024). Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan aplikasi masih timpang antar-OPD karena perbedaan kapasitas teknis, keterbatasan SDM, dan lemahnya koordinasi. Implementasi SPBE yang ideal membutuhkan satu ekosistem digital yang saling terhubung, tidak hanya antar sistem, tetapi juga antar pelaksana kebijakan (Purnamaningsih 2024). Keterpaduan ini menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap efektivitas layanan dan reformasi birokrasi (Santoso and Purwaningsih 2024).

Salah satu konsep penting yang relevan dalam studi ini adalah keterhubungan antara sistem digital dan reformasi birokrasi. Implementasi SPBE tidak hanya menyangkut adopsi teknologi (Khadija et al. 2024), melainkan juga transformasi proses kerja agar lebih efisien dan akuntabel (Rahmah and Meirinawati 2023). Aplikasi SRIKANDI sebagai wujud nyata SPBE dalam pengelolaan arsip dinamis berperan dalam mempercepat proses surat menyurat dan memastikan keamanan informasi (Rahman, Adni, and Nasution 2024). Namun, keberhasilan integrasi digital sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya kerja birokrasi. (Teku et al. 2024) Penelitian oleh Arifin dan Prasetyo (2023) menegaskan bahwa keberhasilan e-government sangat bergantung pada faktor manusia dan keterbukaan organisasi terhadap perubahan teknologi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini menemukan bahwa pelimpahan akun kepada staf dan rendahnya penggunaan TTE menunjukkan lemahnya internalisasi nilai digital dalam praktik harian birokrasi.

Selain kesiapan SDM, infrastruktur dan interoperabilitas sistem menjadi konsep kunci dalam keberhasilan SPBE (Lisdiana et al. 2024). SRIKANDI tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, dan dukungan teknis berkelanjutan (Fragkiadakis et al. 2011). Penelitian Faizah et al.(2025)dan Nurlaela & Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur di tingkat daerah menjadi penyebab utama gagalnya banyak sistem digital berfungsi optimal. Hal serupa ditemukan dalam studi ini, di mana gangguan server nasional serta keterbatasan teknis lokal menjadi faktor penghambat kelancaran pengoperasian SRIKANDI (Müller et al. 2016). Tanpa penguatan infrastruktur dan mekanisme tanggap darurat terhadap gangguan teknis, sistem digital berisiko tidak dapat mendukung proses kerja secara konsisten (Khadija et al. 2024).

Dari sisi kelembagaan, peran kepemimpinan daerah dan konsistensi regulasi lokal sangat menentukan arah dan keberlanjutan implementasi SPBE (Yudi and Pertiwi 2024). Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh Sari & Handayani (2023) dan Dasnoer et al. (2023) yang menekankan bahwa komitmen kepala daerah dan kejelasan regulasi menjadi fondasi keberhasilan penerapan sistem digital. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, dikeluarkannya Instruksi Bupati dan Peraturan Bupati mendorong peningkatan signifikan adopsi SRIKANDI dari 5% di tahun 2022 menjadi 98,5% pada 2024. Selain itu, keberadaan bimtek dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi salah satu faktor akselerasi penerapan sistem di OPD. Hal ini memperkuat argument Febriani & Putra (2023) bahwa keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada kontinuitas pelatihan dan dukungan regulatif yang konsisten.

Kerangka penelitian ini dibangun dengan mengacu pada tujuan utama untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SRIKANDI diterapkan di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang. Konsep-konsep utama yang menjadi landasan adalah efisiensi birokrasi digital, transformasi sistem kearsipan, peran kelembagaan, dan kesiapan sumber daya manusia (Prathama and Sagita 2022). Berdasarkan temuan sebelumnya Dasnoer et al.(2023); (Handayani, Afrianti, and ... 2021), keberhasilan implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, pelatihan teknis yang berkelanjutan, dan kesiapan infrastruktur digital. Selain itu, penelitian oleh (Piculima 2023) dan Febriani & Putra (2023) menunjukkan bahwa resistensi budaya dan lemahnya pengawasan internal menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas kebijakan digital di OPD. Kerangka penelitian ini secara khusus menempatkan aplikasi SRIKANDI sebagai instrumen konkret dari kebijakan SPBE yang dievaluasi melalui pendekatan empiris dan konseptual.

Dalam menyusun kerangka analisis, penelitian ini mengadopsi model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi hubungan antara kebijakan yang dirumuskan secara nasional dengan



dinamika implementasi di tingkat lokal. Temuan-temuan terdahulu seperti studi Faizah et al. (2022), Nurlaela & Firmansyah (2023), serta Sari & Fitriyani (2022) menguatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh faktor teknis, perilaku pelaksana, serta efektivitas struktur organisasi dalam mendukung proses digitalisasi. Dengan demikian, kerangka penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan tingkat penerapan SRIKANDI, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor multidimensional yang membentuk realitas implementasi kebijakan SPBE di pemerintahan daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang difokuskan pada implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Studi kasus tunggal memberikan ruang untuk analisis holistik terhadap fenomena yang kompleks, khususnya terkait dengan interaksi antara regulasi nasional dan praktik birokrasi lokal. Pendekatan kualitatif relevan digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan memahami realitas sosial dan administratif dari sudut pandang pelaksana kebijakan, serta mengeksplorasi hambatan dan potensi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, data diperoleh secara naturalistik dan dapat merepresentasikan pengalaman nyata pelaksana di tiga OPD utama: Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tahapan pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan yang mencakup penentuan fokus masalah, penyusunan instrumen wawancara, serta identifikasi informan kunci dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan kerja OPD, serta pengumpulan dokumen pendukung seperti surat edaran, laporan kegiatan, dan rekaman disposisi elektronik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selama proses berlangsung, dilakukan validasi data melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan selama periode pengumpulan data di lapangan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga proses utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu implementasi aplikasi SRIKANDI dalam kerangka kebijakan SPBE. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk matriks tematik dan narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan antar-variabel, serta temuan kunci berdasarkan kerangka model George C. Edward III. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan, diiringi dengan validasi silang (triangulasi) antara hasil wawancara dan data dokumen untuk menjamin akurasi interpretasi. Dalam mendukung pengolahan data kualitatif ini, peneliti menggunakan aplikasi bantu seperti Microsoft Excel untuk mengorganisasi kutipan dan mengelompokkan tema, serta NVivo (versi 12) sebagai alat bantu analisis tematik guna memetakan frekuensi kemunculan isu-isu utama dan keterkaitan antar kategori secara visual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun menghadapi beberapa tantangan. Analisis didasarkan pada empat variabel model George Edward III.

### Komunikasi

Komunikasi kebijakan SRIKANDI telah dilakukan dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Pj. Sekretaris Daerah: “Kami telah menetapkan aturan bahwa semua surat melalui Sekretariat Daerah harus menggunakan SRIKANDI, dan ini ditegaskan melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023.” Sosialisasi dan bimbingan teknis pada 8–9 Oktober 2024, yang diikuti oleh 40 OPD, memperkuat pemahaman pelaksana. Kepala Bidang Persandian Kominfo menambahkan: “Kami telah mengadakan pelatihan untuk operator, tetapi beberapa OPD masih kesulitan dengan fitur teknis seperti TTE.” Observasi menunjukkan bahwa saluran komunikasi, seperti surat edaran dan pelatihan, telah efektif, meskipun beberapa operator memerlukan panduan tambahan untuk fitur lanjutan aplikasi. Dari analisis NVivo, komunikasi menyumbang 5 dari 23 referensi koding (21,74%), menunjukkan bahwa variabel ini berjalan baik tetapi bukan fokus utama tantangan.

### Sumber Daya

Sumber daya menjadi tantangan utama. Kepala Bidang Kearsipan melaporkan: “Tim SRIKANDI sering melibatkan tenaga honorer, yang rentan terhadap pergantian, sehingga kami harus melatih ulang secara berkala.” Tidak adanya anggaran khusus dari APBD atau APBN untuk pembinaan operator membatasi pengembangan kapasitas. Infrastruktur teknologi juga menjadi kendala, dengan server pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat sering mengalami gangguan saat digunakan serentak. Pj. Sekda mencatat: “Ketika banyak OPD mengakses SRIKANDI bersamaan, sistem sering lambat atau tidak responsif.” Dari 42 OPD, hanya 35 (83,33%) yang aktif menggunakan SRIKANDI pada 2024, belum mencapai target 100%. Analisis NVivo menunjukkan sumber daya menyumbang 8 dari 23 referensi koding (34,78%), menegaskan bahwa ini adalah salah satu tantangan utama.

### Disposisi

Disposisi pelaksana menunjukkan performa yang sangat baik. Pencatat surat di Dinas Kesehatan menyatakan: “Pimpinan kami sangat mendukung penggunaan SRIKANDI. Dengan TTE, surat bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan ketika Kepala Dinas sedang di luar kantor.” Pj. Sekda menekankan bahwa tanggung jawab pimpinan OPD dalam menggunakan TTE telah meningkatkan efisiensi: “Setiap pimpinan OPD bertanggung jawab langsung untuk memastikan surat menggunakan SRIKANDI.” Observasi menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan merasakan manfaat dari kecepatan penerbitan dokumen, seperti surat rekomendasi kesehatan, yang dikirim melalui WhatsApp. Analisis NVivo menunjukkan disposisi hanya menyumbang 1 dari 23 referensi koding (4,35%), menunjukkan bahwa variabel ini bukanlah kendala utama.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah variabel dengan tantangan terbesar. Kepala Bidang Kearsipan menjelaskan: “Kami belum memiliki SOP resmi untuk penggunaan SRIKANDI. Saat ini, prosedur diatur melalui SK, yang kurang mengikat.” Hal ini menyebabkan ketidakseragaman prosedur di OPD, dengan beberapa unit menggunakan pendekatan ad-hoc. Pj. Sekda mencatat: “Tanpa SOP, pengawasan menjadi lemah, dan beberapa OPD tidak konsisten dalam penggunaan aplikasi.” Meskipun dukungan pimpinan telah mendorong adopsi, ketiadaan SOP

menghambat standarisasi dan fleksibilitas organisasi dalam mengadopsi sistem digital. Analisis NVivo menunjukkan struktur birokrasi menyumbang 9 dari 23 referensi koding (39,13%), menegaskan bahwa ini adalah fokus utama tantangan.

**Tabel 1. Distribusi Referensi Koding Berdasarkan Variabel George Edward III**

Variabel	Jumlah Referensi	Persentase (%)
Struktur Birokrasi	9	39,13
Sumber Daya	8	34,78
Komunikasi	5	21,74
Disposisi	1	4,35
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis NVivo 12 Plus, 2024

**Tabel 2. Tingkat Adopsi SRIKANDI di OPD Sidenreng Rappang (2024)**

Status Adopsi	Jumlah OPD	Persentase (%)
Aktif Menggunakan	35	83,33
Tidak Aktif	7	16,67
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

## Pembahasan

### Analisis Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi SRIKANDI di Sidenreng Rappang menunjukkan performa yang baik, sejalan dengan temuan PUTRI (2024) keberadaan regulasi lokal, seperti Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023, serta kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan pada Oktober 2024, telah berkontribusi signifikan dalam menyampaikan informasi kebijakan secara sistematis kepada para pelaksana. Kejelasan kebijakan ini menciptakan kesamaan pemahaman awal yang penting sebagai fondasi pelaksanaan sistem digital. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala bidang terkait yang menegaskan bahwa semua proses surat-menyurat di lingkup Sekretariat Daerah harus melalui SRIKANDI. Namun demikian, hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam mengungkap bahwa sebagian OPD masih menghadapi kendala dalam memahami aspek teknis aplikasi, khususnya terkait dengan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian kebijakan dan pemahaman operasional teknis di tingkat pelaksana Menurut Wahab (2021), menekankan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan isi pesan, tetapi juga pada kesinambungan saluran komunikasi dan adanya mekanisme umpan balik yang responsif. Dalam konteks ini, komunikasi yang bersifat satu arah melalui surat edaran atau pelatihan awal belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan model komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara pembuat kebijakan dan pelaksana, misalnya melalui forum diskusi berkala, sesi tanya jawab daring, atau klinik teknis bulanan. Strategi ini sejalan dengan praktik baik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah lain dalam penerapan SPBE, seperti dilaporkan oleh Sari dan Handayani (2023), yang menunjukkan bahwa komunikasi berkelanjutan dapat meningkatkan adopsi dan kepatuhan kebijakan digital.

Selain itu pemerintah daerah untuk mengembangkan media komunikasi yang adaptif dan mudah diakses, seperti panduan teknis berbasis video, infografis interaktif, atau modul e-learning yang dapat digunakan secara mandiri oleh operator. Penyediaan materi komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital pengguna akan mempercepat pemahaman teknis dan mengurangi resistensi dalam adopsi sistem baru. Sebagaimana disarankan oleh Khadija et al. (2024), integrasi pendekatan edukatif dalam strategi komunikasi kebijakan sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman teknis dalam penerapan SPBE.

## Analisis Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks penerapan aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil temuan lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan dominan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Permasalahan ini mencerminkan pola yang juga ditemukan dalam studi oleh Dasnoer et al. (2023), yang menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas teknis pelaksana dan keterbatasan dukungan infrastruktur sering kali menjadi titik rawan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah.

Secara spesifik, tantangan utama terletak pada ketergantungan terhadap tenaga honorer yang bersifat tidak permanen, sehingga menyebabkan terjadinya sirkulasi SDM yang tinggi dan kebutuhan pelatihan ulang yang terus-menerus. Tidak adanya formasi arsiparis fungsional tetap dalam struktur organisasi sebagian besar OPD menyebabkan kurangnya keberlanjutan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait penggunaan SRIKANDI. Di sisi lain, tantangan teknis juga muncul dari infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai. Gangguan pada server pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti yang dilaporkan Rinawaty (2023) menunjukkan bahwa arsitektur teknologi belum mampu mendukung beban akses secara bersamaan dari banyak OPD. Ketidakstabilan sistem ini menghambat kelancaran operasional aplikasi, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kepercayaan pelaksana terhadap keandalan platform digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan pengalokasian anggaran secara eksplisit dalam APBD untuk mendukung pelatihan teknis berkala bagi operator SRIKANDI. Program pelatihan ini sebaiknya dirancang tidak hanya berbasis materi pengoperasian teknis, tetapi juga mencakup aspek keamanan informasi, tata kelola arsip digital, dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Kedua, perekrutan tenaga arsiparis fungsional permanen menjadi kebutuhan mendesak guna membangun kompetensi kelembagaan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kontrak.

Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), diperlukan untuk memastikan perbaikan infrastruktur server pusat dan mekanisme respons teknis yang tanggap terhadap gangguan sistem. Pendekatan ini juga relevan dengan prinsip koordinasi lintas level pemerintahan dalam implementasi kebijakan digital sebagaimana disarankan oleh Faizah et al. (2025), bahwa keberhasilan e-government membutuhkan sinkronisasi antara pusat dan daerah, baik dalam aspek teknis maupun regulatif..

## Analisis Disposisi

Disposisi pelaksana di Dinas Kesehatan sangat positif, didukung oleh komitmen pimpinan dan kemudahan TTE. Hal ini sejalan dengan temuan PUTRI (2024) bahwa dukungan pimpinan meningkatkan adopsi teknologi. Kecepatan layanan yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa disposisi positif memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Contohnya, surat rekomendasi kesehatan yang diterbitkan melalui SRIKANDI dapat dikirim ke masyarakat dalam hitungan jam, meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Namun, untuk mempertahankan motivasi ini, pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri operator dalam menggunakan aplikasi.

## Analisis Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah tantangan terbesar, dengan ketiadaan SOP resmi menyebabkan ketidakseragaman prosedur. Temuan ini mirip dengan laporan Rinawaty (2023) bahwa kurangnya petunjuk teknis menghambat implementasi. Menurut (Rinawaty 2023), struktur



birokrasi yang jelas adalah prasyarat untuk keberhasilan kebijakan. Analisis NVivo menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki referensi koding tertinggi (39,13%), menegaskan bahwa ini adalah fokus utama untuk perbaikan. Penyusunan SOP resmi, yang mencakup prosedur penggunaan SRIKANDI, pengawasan, dan evaluasi, dapat meningkatkan standarisasi dan efektivitas implementasi.

### **Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memperkuat relevansi model George Edward III dalam analisis implementasi kebijakan digital. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi dan disposisi adalah pendorong utama keberhasilan, sementara sumber daya dan struktur birokrasi adalah hambatan utama. Ini sejalan dengan argumen Wahab (2021) bahwa keberhasilan implementasi memerlukan sinergi antara keempat variabel. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur e-government dengan menyoroti tantangan implementasi teknologi digital di daerah, yang sering kali diabaikan dalam studi berbasis perkotaan.

### **Implikasi Praktis**

Implementasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan potensi besar untuk transformasi digital, tetapi memerlukan penguatan sumber daya dan struktur birokrasi. Rekomendasi praktis meliputi:

1. **Penyusunan SOP Resmi:** Pemerintah daerah perlu menyusun SOP yang mengatur penggunaan SRIKANDI, termasuk prosedur persuratan, pengawasan, dan evaluasi.
2. **Alokasi Anggaran:** Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan operator dan peningkatan infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet dan perangkat keras.
3. **Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat:** Bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB dan ANRI untuk meningkatkan stabilitas server pusat dan menyediakan panduan teknis.
4. **Pelatihan Berkelanjutan:** Menyelenggarakan pelatihan reguler bagi operator SRIKANDI, dengan fokus pada fitur teknis seperti TTE dan pengelolaan arsip digital, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi. Pelatihan ini dapat melibatkan tenaga arsiparis fungsional dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai fasilitator, memanfaatkan keahlian internal untuk mengurangi biaya.
5. **Penguatan Pengawasan:** Membentuk tim pengawas di tingkat kabupaten untuk memantau penggunaan SRIKANDI di semua OPD, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan. Tim ini dapat dipimpin oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan otoritas dan koordinasi yang kuat.
6. **Kampanye Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat SRIKANDI, seperti kecepatan layanan dan transparansi, melalui media sosial dan sesi sosialisasi di puskesmas. Hal ini dapat memperkuat dukungan publik terhadap transformasi digital di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **KESIMPULAN**

Implementasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kemajuan yang signifikan, didukung oleh komunikasi yang jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 dan disposisi positif pimpinan. Fitur TTE telah mempercepat persuratan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui layanan yang lebih cepat, seperti penerbitan surat rekomendasi kesehatan. Namun, ketiadaan SOP resmi dan keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi tetap menjadi tantangan utama. Analisis NVivo menunjukkan bahwa struktur birokrasi (39,13% referensi koding) dan sumber daya (34,78%) adalah isu dominan, menegaskan perlunya penyusunan SOP dan penguatan kapasitas teknis.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan memperkuat relevansi model George Edward III dalam konteks e-government. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi seperti penyusunan SOP, alokasi anggaran untuk pelatihan, dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan stabilitas server. Keterbatasan penelitian, yaitu fokus pada Dinas Kesehatan dan pendekatan kualitatif, menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih luas dan kuantitatif. Dengan mengatasi tantangan yang diidentifikasi, Sidenreng Rappang dapat memaksimalkan potensi SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, fokus pada Dinas Kesehatan membatasi generalisasi temuan ke OPD lain di Sidenreng Rappang. OPD lain, seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Pekerjaan Umum, mungkin menghadapi tantangan yang berbeda karena variasi dalam jenis dokumen dan intensitas penggunaan arsip. Kedua, pendekatan kualitatif, meskipun mendalam, tidak memberikan data kuantitatif tentang efektivitas SRIKANDI, seperti waktu rata-rata penyelesaian surat atau penghematan biaya. Ketiga, penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga bulan, sehingga tidak menangkap dinamika implementasi jangka panjang, seperti dampak pelatihan berkelanjutan atau stabilitas server setelah peningkatan infrastruktur.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk:

1. Melibatkan lebih banyak OPD untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi SRIKANDI di Sidenreng Rappang.
2. Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas SRIKANDI, seperti analisis waktu penyelesaian surat atau penghematan biaya dibandingkan sistem manual.
3. Meneliti dampak jangka panjang implementasi SRIKANDI, termasuk perubahan budaya kerja dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
4. Membandingkan implementasi SRIKANDI di Sidenreng Rappang dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan.

Penelitian lanjutan ini dapat memperkaya literatur e-government dan memberikan panduan yang lebih spesifik untuk pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi digital.

## REFERENSI

- Asmara Siregar, Dian, . Okparizan, And Armauliza Septiawan. 2024. "Effectiveness In Implementing Office Administration Interconnection Policy Through The Srikandi Application At The Tanjungpinang City Council Secretariat." *International Journal Of Innovative Science And Research Technology (IJISRT)* 831–45. Doi: 10.38124/Ijsrt/IJISRT24JUN1411.
- Dasnoer, H., A. Frinaldi, And L. Magriasti. 2023. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang." *Jurnal Ilmiah Wahana ....*
- Faizah, Nova Auliyatul, Muhammad Thohir, Sultan Salem, And Mardhiyah. 2025. "Optimizing Digital Archive Management To Improve The Quality Of Integrated Public Services." *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4(1):31–43. Doi: 10.59373/Kharisma.V4i1.64.
- Febriani, K. T., And A. Putra. 2023. "Pengaruh Konsistensi Implementasi Kebijakan Terhadap Niat Keberlanjutan Penggunaan SRIKANDI Di Kota Palembang." *The Indonesian Journal Of Computer Science*.
- Fragkiadakis, Alexandros G., Ioannis G. Askoxylakis, Elias Z. Tragos, And Christos V. Verikoukis. 2011. "Ubiquitous Robust Communications For Emergency Response Using Multi-Operator Heterogeneous Networks." *EURASIP Journal On Wireless Communications And Networking* 2011(1):13. Doi: 10.1186/1687-1499-2011-13.

- Hafel, Muhlis. 2023. "Digital Transformation In Politics And Governance In Indonesia: Opportunities And Challenges In The Era Of Technological Disruption." *Society* 11(2):742–57. Doi: 10.33019/Society.V11i2.577.
- Handayani, S., D. A. Afrianti, And ... 2021. "Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di DKI Jakarta." *Jurnal Teknologi* ....
- Hernawan, And Indra Dharma Wijaya. 2024. "An Analysis Of The Challenges And Opportunities For Governance In Indonesia During The Digital Transformation Of Public Organisations." *Proceeding Of Research And Civil Society Desemination* 2(1):236–43. Doi: 10.37476/Presed.V2i1.45.
- Khadija, Mutiara Auliya, Ida Setya Dwi Jayanti, Hanum Kartikasari, And Fahmi Ulin Nimah. 2024. "Bimbingan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan: Tinjauan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(1):28. Doi: 10.20527/Btjpm.V6i1.9812.
- Lisdiana, Lisdiana, Gerry Firmansyah, Agung Mulyo Widodo, And Budi Tjahjono. 2024. "Optimization Of Electronic-Based Government System Architecture (SPBE) In The Application Architecture Domain In XYZ District." *Asian Journal Of Social And Humanities* 2(12):3094–3104. Doi: 10.59888/Ajosh.V2i12.405.
- Müller, Wilmuth, Hugo Marques, Luis Pereira, Jonathan Rodriguez, Frank Brouwer, Bert Bouwers, Ilias Politis, Asimakis Lykourgiotis, Alexandros Ladas, Olayinka Adigun, And David Jelenc. 2016. "Secure And Interoperable Communication Infrastructures For PPDR Organisations." P. 98490D In, Edited By R. Suresh.
- Piculima, H. H. 2023. *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Etd.Repository.Ugm.Ac.Id.
- Prathama, Malvie, And Novie Indrawati Sagita. 2022. "KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI PADA PROGRAM E-SAKIP DESA DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020)." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* 2(1):1. Doi: 10.24198/Janitra.V2i1.41096.
- Purnamaningsih, Putu Eka. 2024. "Electronic Government Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi): Studi Kasus Kpu Provinsi Bali." *Socio-Political Communication And Policy Review* 1(3):136–41. Doi: 10.61292/Shkr.127.
- PUTRI, A. 2024. *IMPLEMENTASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DALAM PENGELOLAAN ARSIP DI KANTOR* .... Repository.Uin-Suska.Ac.Id.
- Rahmah, Faizatur, And Meirinawati Meirinawati. 2023. "PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PROBOLINGGO." *Publika* 2341–50. Doi: 10.26740/Publika.V11n3.P2341-2350.
- Rahman, Khairul, Dita Fisdian Adni, And M. Ari Tri Putra Nasution. 2024. "Enhancing E-Government In Digital Transformation: Integrating Archive Management And Digital Solutions In Pekanbaru, Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14(2):262–76. Doi: 10.26618/Ojip.V14i2.12374.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat. 2023. "Application Of ICT (Information Communication And Technology) Towards Transformation Of Regional Bureaucracy." Pp. 153–65 In *Advances And Challenges In Science And Technology Vol. 9*. B P International (A Part Of SCIENCEDOMAIN International).
- Rinawaty, N. P. M. 2023. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM*

- INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL ...* Repository.Stialan.Ac.Id.
- Santoso, Elga Dwiky, And Sri Budi Purwaningsih. 2024. "Ensuring Security In Indonesia's Digital Landscape Using Electronic Signature Validation." *Indonesian Journal Of Law And Economics Review* 19(3). Doi: 10.21070/Ijler.V19i3.1208.
- Sari, D. A., And N. Handayani. 2023. "Implementasi Kebijakan Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Tipe C Pada Bangunan Prasarana Dan Peralatan Di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah." *PUBLICNESS: Journal Of Public ...*
- Suprayitno, Suprayitno, Rahmi Rahmi, And Zulfatun Sofiyani. 2024. "Imagining The Future Of Records Management: An Analysis Of The SRIKANDI In Indonesia Through Documentation Studies." *Proceedings From The Document Academy* 11(2). Doi: 10.35492/Docam/11/2/8.
- Teku, Marici, Jonas Gobang, Markus Retu, And Viktor Sedu. 2024. "Digital Transformation Of Archives Through The SRIKANDI Application." *IJESS International Journal Of Education And Social Science* 5(2):261–68. Doi: 10.56371/Ijess.V5i2.334.
- Wagola, Riswan, Achmad Nurmandi, Misran, And Dimas Subekti. 2023. "Government Digital Transformation In Indonesia." Pp. 286–96 In.
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Books.Google.Com.
- Yudi, Amanda Salsabilah Syah, And Vidya Imanuari Pertiwi. 2024. "IMPLEMENTASI SRIKANDI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG." *Jurnal Progress Administrasi Publik* 4(1):46–52. Doi: 10.37090/Jpap.V4i1.1258.
- asmara Siregar, Dian, . Okparizan, And Armauliza Septiawan. 2024. "Effectiveness In Implementing Office Administration Interconnection Policy Through The Srikandi Application At The Tanjungpinang City Council Secretariat." *International Journal Of Innovative Science And Research Technology (IJISRT)* 831–45. Doi: 10.38124/Ijisrt/IJISRT24JUN1411.
- Dasnoer, H., A. Frinaldi, And L. Magriasti. 2023. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang." *Jurnal Ilmiah Wahana ...*
- Faizah, Nova Auliyatul, Muhammad Thohir, Sultan Salem, And Mardhiyah. 2025. "Optimizing Digital Archive Management To Improve The Quality Of Integrated Public Services." *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4(1):31–43. Doi: 10.59373/Kharisma.V4i1.64.
- Febriani, K. T., And A. Putra. 2023. "Pengaruh Konsistensi Implementasi Kebijakan Terhadap Niat Keberlanjutan Penggunaan SRIKANDI Di Kota Palembang." *The Indonesian Journal Of Computer Science*.
- Fragkiadakis, Alexandros G., Ioannis G. Askoxylakis, Elias Z. Tragos, And Christos V. Verikoukis. 2011. "Ubiquitous Robust Communications For Emergency Response Using Multi-Operator Heterogeneous Networks." *EURASIP Journal On Wireless Communications And Networking* 2011(1):13. Doi: 10.1186/1687-1499-2011-13.
- Hafel, Muhlis. 2023. "Digital Transformation In Politics And Governance In Indonesia: Opportunities And Challenges In The Era Of Technological Disruption." *Society* 11(2):742–57. Doi: 10.33019/Society.V11i2.577.
- Handayani, S., D. A. Afrianti, And ... 2021. "Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di DKI Jakarta." *Jurnal Teknologi ...*
- Hernawan, And Indra Dharma Wijaya. 2024. "An Analysis Of The Challenges And Opportunities For Governance In Indonesia During The Digital Transformation Of Public Organisations." *Proceeding Of Research And Civil Society Desemination* 2(1):236–43.



- Doi: 10.37476/Presed.V2i1.45.
- Khadija, Mutiara Auliya, Ida Setya Dwi Jayanti, Hanum Kartikasari, And Fahmi Ulin Nimah. 2024. "Bimbingan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan: Tinjauan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(1):28. Doi: 10.20527/Btjpm.V6i1.9812.
- Lisdiana, Lisdiana, Gerry Firmansyah, Agung Mulyo Widodo, And Budi Tjahjono. 2024. "Optimization Of Electronic-Based Government System Architecture (SPBE) In The Application Architecture Domain In XYZ District." *Asian Journal Of Social And Humanities* 2(12):3094–3104. Doi: 10.59888/Ajosh.V2i12.405.
- Müller, Wilmuth, Hugo Marques, Luis Pereira, Jonathan Rodriguez, Frank Brouwer, Bert Bouwers, Ilias Politis, Asimakis Lykourgiotis, Alexandros Ladas, Olayinka Adigun, And David Jelenc. 2016. "Secure And Interoperable Communication Infrastructures For PPDR Organisations." P. 98490D In, Edited By R. Suresh.
- Piculima, H. H. 2023. *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Etd.Repository.Ugm.Ac.Id.
- Prathama, Malvie, And Novie Indrawati Sagita. 2022. "KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI PADA PROGRAM E-SAKIP DESA DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020)." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* 2(1):1. Doi: 10.24198/Janitra.V2i1.41096.
- Purnamaningsih, Putu Eka. 2024. "Electronic Government Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi): Studi Kasus Kpu Provinsi Bali." *Socio-Political Communication And Policy Review* 1(3):136–41. Doi: 10.61292/Shkr.127.
- PUTRI, A. 2024. *IMPLEMENTASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DALAM PENGELOLAAN ARSIP DI KANTOR ....* Repository.Uin-Suska.Ac.Id.
- Rahmah, Faizatur, And Meirinawati Meirinawati. 2023. "PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PROBOLINGGO." *Publika* 2341–50. Doi: 10.26740/Publika.V11n3.P2341-2350.
- Rahman, Khairul, Dita Fisdian Adni, And M. Ari Tri Putra Nasution. 2024. "Enhancing E-Government In Digital Transformation: Integrating Archive Management And Digital Solutions In Pekanbaru, Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14(2):262–76. Doi: 10.26618/Ojip.V14i2.12374.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat. 2023. "Application Of ICT (Information Communication And Technology) Towards Transformation Of Regional Bureaucracy." Pp. 153–65 In *Advances And Challenges In Science And Technology Vol. 9*. B P International (A Part Of SCIENCEDOMAIN International).
- Rinawaty, N. P. M. 2023. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL ....* Repository.Stialan.Ac.Id.
- Santoso, Elga Dwiky, And Sri Budi Purwaningsih. 2024. "Ensuring Security In Indonesia's Digital Landscape Using Electronic Signature Validation." *Indonesian Journal Of Law And Economics Review* 19(3). Doi: 10.21070/Ijler.V19i3.1208.
- Sari, D. A., And N. Handayani. 2023. "Implementasi Kebijakan Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Tipe C Pada Bangunan Prasarana Dan Peralatan Di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah." *PUBLICNESS: Journal Of Public ....*



- Suprayitno, Suprayitno, Rahmi Rahmi, And Zulfatun Sofiyani. 2024. "Imagining The Future Of Records Management: An Analysis Of The SRIKANDI In Indonesia Through Documentation Studies." *Proceedings From The Document Academy* 11(2). Doi: 10.35492/Docam/11/2/8.
- Teku, Marici, Jonas Gobang, Markus Retu, And Viktor Sedu. 2024. "Digital Transformation Of Archives Through The SRIKANDI Application." *IJESS International Journal Of Education And Social Science* 5(2):261–68. Doi: 10.56371/Ijess.V5i2.334.
- Wagola, Riswan, Achmad Nurmandi, Misran, And Dimas Subekti. 2023. "Government Digital Transformation In Indonesia." Pp. 286–96 In.
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Books.Google.Com.
- Yudi, Amanda Salsabilah Syah, And Vidya Imanuari Pertiwi. 2024. "IMPLEMENTASI SRIKANDI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG." *Jurnal Progress Administrasi Publik* 4(1):46–52. Doi: 10.37090/Jpap.V4i1.1258.